

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak tahun 1999, menurut Juri *et al.* (2023) pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi dengan maksud untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Desentralisasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparatur desa yang memegang peranan krusial dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. di tingkat desa. Meskipun demikian, terdapat kendala terkait kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Menurut peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa peran kantor desa dan aparat desa bersifat umum. Pemerintah dianggap memiliki kinerja yang optimal ketika mampu mengelola administrasi pemerintahan dengan efisien, sehingga masyarakatnya dapat menikmati kesejahteraan secara menyeluruh. Permintaan untuk kinerja yang baik ini umumnya muncul dalam berbagai pemerintahan, terutama seiring dengan implementasi konsep otonomi daerah dan pembentukan regulasi terkait manajemen pemerintahan, termasuk di Kabupaten Bungo (Edowati *et al.*, 2021).

Pada beberapa desa di Kabupaten Bungo, terutama di wilayah kecamatan Pelepat Ilir. masih terdapat permasalahan terkait penyalahgunaan dana desa oleh sejumlah pihak, yang kemungkinan disebabkan oleh Ketidapahaman aparat pemerintahan desa di Kabupaten Bungo dalam mengelola dana desa dengan efektif. Dalam hal ini, diperlukan perbaikan dalam Pemanfaatan dana desa yang tidak sesuai dengan tujuannya. Permasalahan Itu terpengaruh oleh beberapa

faktor, seperti minimnya sosialisasi dari pihak kepemimpinan kepada aparatur mengenai pengelolaan laporan hasil keuangan dan pengelolaan dana desa, Ketidacukupan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat mengenai prioritas penggunaan dana desa dapat menyebabkan miskomunikasi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan rencana. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas dan transparansi yang memadai untuk mendukung kepala desa dalam mengelola dana desa (Padilah *et al.*, 2023). Berdasarkan laporan kinerja pemerintah daerah kabupaten bungo tahun 2022 juga dijelaskan bahwa salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta kepemimpinan yang baik. Tuntutan ini tertuju pada terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mencapai kinerja aparatur pemerintah desa yang optimal, Gaya kepemimpinan di tingkat desa secara kuat terkait dengan kinerja keseluruhan aparat pemerintah desa. Pemimpin desa menjadi indikator penting dalam proses pembangunan organisasi. Keterkaitan antara kepala desa dan perangkat desa merupakan aspek yang sangat penting, di mana diinginkan terciptanya situasi yang mendukung terjadinya musyawarah. Dengan demikian, kontrol sosial, persetujuan, atau penolakan dapat dilakukan bersamaan dengan alasan-alasan yang rasional. Gaya kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan motivasi perangkat desa, mendorong mereka untuk bekerja lebih optimal, dan secara keseluruhan meningkatkan kinerja organisasi desa (Wardiana & Hermanto, 2019).

Akuntabilitas memegang peranan yang sangat krusial dalam konteks penelitian ilmiah maupun dalam praktik administrasi publik. Hal ini terjadi karena masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap implementasi kebijakan, program, dan kegiatan rutin oleh organisasi sektor publik. Prinsip akuntabilitas menitikberatkan pada kemampuan organisasi sektor publik untuk merespons kebutuhan informasi dari pihak yang memerlukan pengetahuan tentang organisasi tersebut. Harapannya, akuntabilitas dapat meningkatkan mutu dan kinerja organisasi, dengan fokus yang lebih mendalam pada kepentingan publik. Aspek akuntabilitas melibatkan penyediaan informasi keuangan kepada masyarakat dan pihak lainnya, memungkinkan mereka untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah terhadap semua kegiatan yang dilakukan, dan bukan hanya terbatas pada kegiatan finansial semata (Raja, 2021).

Akuntabilitas merupakan implementasi dari tanggung jawab Seseorang atau entitas organisasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban terkait dengan manajemen dan pengawasan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepercayaan kepada mereka dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kesadaran akan akuntabilitas pada seorang pegawai dapat berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan pekerjaannya secara optimal. Prinsip akuntabilitas juga menyoroti peran pengawas dan mengharapkan agar pejabat dan pegawai merencanakan dan menganggarkan proses dengan baik, dengan demikian, mereka dapat memberikan layanan publik secara optimal dan meningkatkan mutu kinerja. Dengan mengimplementasikan prinsip akuntabilitas publik, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk

memberikan pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Ini mencerminkan urgensi akuntabilitas publik dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan mengimplementasikan prinsip akuntabilitas sebagai kewajiban bagi individu atau entitas yang diberi tanggung jawab untuk memenuhi pertanggungjawaban, individu tersebut bertugas menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah., hal ini dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah, terutama dalam aspek keuangan. Tujuannya adalah untuk mendorong tercapainya tata kelola yang baik atau *good governance* (Novatiani A, Rusmawan Kusumah R, 2019).

Sama seperti akuntabilitas, transparansi juga memiliki peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan pemerintahan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat terkait kebijakan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan data, termasuk informasi keuangan, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Raja, 2021). Transparansi merupakan upaya menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, Berdasarkan prinsip bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi rinci mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang diberikan kepadanya, serta untuk mematuhi peraturan perundang-undangan (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010). Dengan menerapkan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, dapat terjadi peningkatan kinerja karena semua kegiatan, program, dan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terbuka dan diumumkan untuk masyarakat. Dengan memperluas saluran transparansi yang sudah ada dalam pemerintahan, pengawasan dari pihak yang memberikan amanah dan masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga pencapaian kinerja pemerintah dapat meningkat. Penerapan transparansi di setiap perangkat daerah memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan menyediakan informasi yang relevan dan akurat secara terbuka (Novatiani A, Rusmawan Kusumah R, 2019).

Dari pemaparan di atas, fenomena yang menjadi perhatian serius saat ini adalah terkait dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa. Fenomena ini didasarkan pada berita yang diterbitkan oleh *JambiBeda.id*, (2023) berdasarkan berita tersebut, terdapat dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Dusun Danau Kecamatan Pelepat Ilir. Selain itu kinerja aparat pemerintah desa juga sering kali menjadi fokus kritik dari masyarakat, tantangan yang terlihat melibatkan tingkat keterampilan dan keahlian aparat pemerintah desa yang rendah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kesulitan mencapai pelayanan yang bermutu disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa tentang cara memberikan layanan yang efektif. Selain itu, rendahnya kemampuan aparat pemerintah desa dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah

juga merupakan faktor, bersama dengan kekurangan kepemimpinan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelitian Novatiani *et al.* (2019) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan sementara itu pada penelitian yang dilakukan oleh (Wardiana & Hermanto, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Padilah *et al.* (2023) menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi memengaruhi kinerja pemerintah desa, sementara transparansi dan kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya, menjadi jelas bahwa penting untuk diteliti sejauh mana kualitas kinerja aparat pemerintah desa di Kecamatan Pelepat Ilir. Ketertarikan peneliti terhadap fenomena di kecamatan tersebut terfokus pada aspek-aspek seperti akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas aparat pemerintah desa. Dengan menjadikan Pelepat Ilir sebagai studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja aparat pemerintah desa.

Ada banyak penelitian sebelumnya yang telah mengkaji bagaimana kepemimpinan, Akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya dari Novatiani *et al.* (2019) untuk menambah penelitian tentang kualitas pelayanan publik ditempat yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat

penelitian yang berada di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan menambah variabel independen yaitu gaya kepemimpinan. Selain itu Kecamatan Pelepat Ilir juga terkenal sebagai salah satu desa pemasok sawit terbesar di Sumatera, kelapa sawit berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pelepat Ilir. Dengan kondisi perekonomian sudah berkembang kondisi tersebut dapat mempengaruhi Kualitas sumber daya manusia dan kondisi lingkungan kerja di instansi aparat pemerintahan desa menjadi fokus penelitian ini. Keunikannya terletak pada kurangnya penelitian yang dilakukan di Pelepat Ilir, sebuah desa penghasil sawit. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menginvestigasi kinerja aparat pemerintah desa, dan penelitian ini diberi judul: Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Sekecamatan Pelepat ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada penjelasan latar belakang di atas, dapat dibentuk perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa?
3. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa?

1.3 Batasan masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi variabel independen nya yaitu hanya berfokus pada gaya kepemimpinan, akuntabilitas dan transparansi saja dengan mengabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur desa di desa-desa se kecamatan pelepat ilir.

1.4 Tujuan penelitian

Berlandaskan pada perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.
2. Untuk menguji apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.
3. Untuk menguji apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

A. Manfaat teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dengan tujuan untuk menyumbangkan lebih banyak literatur penelitian tentang pengaruh Gaya Kepemimpinan, Akuntabilitas Dan Transparansi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

B. Manfaat praktis

1) Manfaat untuk penulis

Penelitian ini memberikan manfaat secara personal, yakni dengan meningkatkan pengalaman dan wawasan penulis, serta menambah informasi baru dalam mewujudkan penerapan Gaya kepemimpinan yang lebih baik. Selain itu penelitian ini juga memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami topik terkait kinerja aparatur pemerintah desa.

2) Manfaat untuk penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai pedoman untuk penelitian yang akan datang mengenai variabel Kepemimpinan, Akuntabilitas, dan Transparansi, sehingga dapat berperan sebagai sumber pengetahuan bagi para pembaca. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi.